

HALAMAN COVER



HALAMAN PERSETUJUAN



HALAMAN PENGESAHAN



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama: Uswatun hasanah

NIM : 1550101071111014

Menyatakan bahwa penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi/legal memorandum ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan/atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya aorang lain yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan diperguaruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaannya.

Malang, 11 April 2019

Yang menyatakan

Uswatun Hasanah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan pada kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Studi di Desa Buntan Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang)”**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampusan yang penulis miliki. Namun penuli berusaha untuk mempersembahkan skripsi ini sebaik-baiknya agar dapat memiliki manfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan ssaran yang membangun dalam perbaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materiil, sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terimakasih yang begitu besar kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis.
2. Orang tua tercinta, Ibu Sumiati dan Bapak H.Rofek yang selalu memberikan do’a, semangat, serta kasih sayang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
3. Suami tercinta, Samsudin yang selalu memberikan do’a, semangat, dukungan materiil, serta kasih sayang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
4. Adik-adik tersayang (Laila Alfi Sahara, Achmad effendy Rofek, Muhammad Irfandy Rofek serta Muhammad Fahad Rofek) yang selalu memberikan dukungan dan semangat agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr.Istislam. SH,MH dan Ibu Dr.Indah Dwi Qurbani. SH,MH selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan petunjuk, pengetahuan, selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Lutfi Effendi. SH,MHum selaku Ketua Bagian Program Studi Hukum Administrasi Negara.
7. Seluruh bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu yang tidak terbatas selama kuliah di Universitas Brawijaya.
8. Sahabat-sahabat MADURECHT FH UB yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
9. Seluruh Pemerintah Desa Buntan Barat dan Masyarakat Desa Buntan Barat yang sudah melayani penulis serta membantu dalam kelancaran proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih yang tidak terhingga pada semua pihak yang terlibat, dengan harapan semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak

Malang, 10 April 2019
Penulis,

Uswatun Hasanah



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
RINGKASAN	xi
SUMMARY	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tabel Orisinalitas.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Transparansi.....	12
B. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.....	13
C. Penilaian Kinerja Kepala Desa	14
D. Mekanisme Pengawasan Keuangan	16
BAB III METODE PENELITIAN	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian.....	24
3. Lokasi Penelitian.....	24
4. Jenis dan Sumber Data	25
1) Jenis Data	25
2) Sumber Data.....	26

5. Populasi dan Sampel.....	26
6. Teknik Pengumpulan Data	27
7. Tehnik Analisis Data	28
8. Definisi Operasional	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Gambaran Umum	30
1. Perkembangan Kependudukan	30
2. Ekonomi Masyarakat	30
3. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Buntan Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.....	32
B. Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa terkait dengan Penggunaan Dana Desa di Desa Buntan Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.....	32
1. Konsolidasi Dana Desa.....	35
2. Keberagaman Desa dan Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Nasional	37
3. Pemerintahan Desa dalam Perspektif <i>Good Governance</i>	41
a. Konsepsi <i>Good Governance</i>	41
b. Karakteristik <i>Good Governance</i>	42
c. Pemerintahan Desa dalam Perspektif <i>Good Governance</i>	44
C. Mekanisme Pertanggungjawaban Yang Ideal untuk Meningkatkan Transparansi Laporan pertanggung jawaban Kepala Desa terkait Pengelolaan Dana Desa	49
1. Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	51
2. Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Transparansi.....	56
3. Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa yang Ideal	60
BAB V PENUTUP	61
A. KESIMPULAN.....	61
B. SARAN	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Susunan Organisasi	32
Bagan 2. Sumber-Sumber Pendapatan Desa dari Pemerintah yang Dimandatkan UU Desa & Terus-Menerus	36
Bagan 3. Pola Baru Pembangunan Desa: Jalur Singkat Perencanaan Desa	37
Bagan 4. Pelaksanaan Pembangunan: Mengadopsi Swakelola Desa	37
Bagan 5. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan di Desa	39



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian	7
Tabel 2. Peran dan Keterlibatan Masyarakat dalam Rancangan APBDes	23
Tabel 3. Jumlah Penduduk.....	30
Tabel 4. Jumlah Keluarga.....	30
Tabel 5. Pengangguran	30
Tabel 6. Kesejahteraan Keluarga.....	31
Tabel 7. Hasil Kuisisioner pada Masyarakat.....	46



RINGKASAN

Uswatun Hasanah, Hukum Adminitansi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2019, IMPLEMENTASI PASAL 10 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN KEPALA DESA (Studi di Desa Bunten Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang), Dr.Istislam, SH.MH dan Dr.Indah Dwi Qurbani, SH.MH.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk didalamnya tentang kewajiban oleh pemerintah kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya serta pada akhirnya proses pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut. Untuk meningkatkan adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa maka masyarakat harus diberikan media agar dapat mengakses informasi tersebut, adapun media yang dimaksud tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi: Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.

Untuk mengkaji lebih dalam mengenai laporan pertanggung jawaban kepala desa ini maka peneliti membuat rumusan masalah sebagaimana berikut: 1. Bagaimanakah implementasi Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa di desa bunten barat kecamatan ketapang kabupaten sampang? 2. Bagaimanakah mekanisme pertanggungjawaban yang ideal dalam laporan kepala desa untuk meningkatkan transparansi kepala desa bunten barat kecamatan ketapang kabupaten sampang. Dalam menganalisa rumusan masalah pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan ialah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud untuk menemukan fakta(*fact-finding*), yang kemudian menuju penyelesaian masalah. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Jenis data yang digunakan dalam mengkaji sebuah penelitian ialah data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang penulis peroleh secara langsung dengan melakukan wawancara kepada Kepala Desa Bunten Barat, Sekretaris Desa Bunten Barat, Badan Permusyawaratan Desa Bunten Barat dan Masyarakat Desa Bunten Barat.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapat maka diperoleh informasi sebagaimana berikut:

1. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, masih belum dapat dilaksanakan hal ini dikarenakan

- ketidaktahuan Perangkat Desa mengenai adanya kewajiban untuk menginformasikan laporan itu melalui papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya.
2. Mekanisme pertanggung jawaban kepala desa yang ideal ialah membuka ruang diskusi bagi masyarakat untuk ikut serta forum pertanggungjawaban kepala desa, sehingga masyarakat dapat bertanya secara langsung mengenai pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa



SUMMARY

Uswatun Hasanah, Law of State Administration, Faculty of Law, Brawijaya University, May 2019, IMPLEMENTATION OF ARTICLE 10 REGULATION OF THE MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 46 OF 2016 ON REPORT OF THE HEAD OF THE VILLAGE (Study in West Buntén Village, Ketapang District, Sampang District), Dr. Istislam, SH. MH and Dr. Indah Dwi Qurbani, SH.MH.

Government Regulation Number 43 of 2014 concerning the Implementation Regulation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages clearly regulates village governance, including the obligation by the district government to formulate and make regional regulations on Village Fund Allocation as part of the village fiscal authority to regulate and managing its finances. To implement this authority, the village government has sources of revenue that are used to finance the activities carried out. The important thing to note is that there is certainty for the financing and ultimately the accountability process for using the budget. To increase the transparency in managing village funds, the public must be given media to be able to access the information, As for the media referred to listed in the Regulation of the Minister of Domestic Affairs of the Republic of Indonesia Number 46 in 2016 for the Village in article 10 act (4) which reads: Mediation information is generally reduced in act (3) situations to announcements, to communication and mediation in information.

To study more about the village head's answer report, the researcher formulates the problem as follows: 1. How is the implementation in the article 10 Regulations of the of the Minister of Internal Affairs of the Republic of Indonesia Number 46 Year 2016 ON REPORT OF THE HEAD OF THE VILLAGE at West Buntén Village, Ketapang District, Sampang District ? 2. How is the mechanism of ideal responsibility on report of the head of the village to increase the transparency of the village head west buntén, ketapang district, sampang district ? Having said that, despite this research, the author uses a type of empirical juridical law research. In short, when it is empirically empirical, it is observed that when it is closed, it turns out that it turns out to find facts (finding-finding), which then leads to completion. Researchers took the location of research at Buntén Barat Village, Ketapang District, Kabupaten Sampang. The type used is said to have been carried out as a study in the primer and in the secondary. The source is primary and the source is that the writer gets it directly through the incident to the office of West Buntén Secretary of the Buntén Village, village consultative body west buntén, buntén village community.

Based on the results of interviews that the author can obtain information as follows:

1. Article 10 article 10 regulation of the minister of internal affairs of the republic of indonesia number 46 of 2016 on report of the head of the village cannot be implemented, this is due to the ignorance of the village devices regarding the obligation to inform the report through notice boards, radio communications, and other information media.

2. The ideal village head accountability mechanism is to open discussion room for the community to participate in the village head's accountability forum, do that the community can ask directly about the management of the village funds.

Keywords : Head Accountability Report



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat (UUD NRI 1945). Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara dan penduduk harus sesuai dengan hukum. Hal ini sejalan dengan konsep *rechtsstaat*, munculnya konsep *rechtsstaat* yang dikemukakan Freidrich Julius stahl¹ ini diilhami oleh Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukun (*rechtsstaat*) adalah:

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
3. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dan
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan

Konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law* atau *Modern Roman Law*, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *civil law* adalah *judicial*. Perbedaan karakteristik yang demikian disebabkan karena latar belakang dari pada kekuasaan raja. Pada zaman Romawi, kekuasaan yang menonjol dari raja ialah membuat peraturan melalui dekrit. Kekuasaan itu kemudian didelegasikan kepada pejabat-pejabat administratif yang membuat pengarah-pengarah tertulis bagi hakim tentang bagaimana memutus suatu sengketa. Begitu besarnya peranan administrasi, sehingga tidaklah mengherankan kalau dalam sistem kontinental mula pertama

¹Mirriam Budiardjo dan Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 3.

muncul cabang hukum baru yang disebut *droit administratif* dan inti dari *droit administratif* adalah hubungan antara administrasi dengan rakyat.

Begitu pentingnya hukum administrasi sehingga menyebabkan masyarakat harus taat pada ketentuan administrasi yang ada. Kebijakan administrasi terkait penyelenggaraan negara tidak hanya bertumpu pada penyelenggaraan pemerintahan di pusat saja, melainkan juga di daerah. Bahkan di desa, landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Eksistensi desa semakin di perhitungkan sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam perspektif politik hukum, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pergulatan pemikiran politik yang panjang, sekaligus pergulatan pemikiran untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan kualitas kehidupan. Keahiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kristalisasi kehendak politik di parlemen yang hendak menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014. Undang-Undang Desa yang lahir ditahun politik, sangat mungkin menjadi komoditas politik, karena melalui Undang-Undang Desa partai-partai politik ingin meraup suara pemilih dipedesaan, sehingga tuntutan masyarakat dan aparatur desa dapat terkomodir didalamnya. Partai-partai bersaing mencari simpati masyarakat di desa dengan mengkampanyekan bahwa Undang-Undang Desa adalah buah perjuangan partai-partai tersebut. Dan menjadi wajar kalau kemudian perangkat desa segera menuntut janji kampanye tersebut untuk diimplementasikan pada tahun 2015.

Terlepas dari pertarungan politik dalam Pemilu 2014, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masyarakat di desa telah mendapatkan payung hukum yang lebih kuat dibandingkan pengaturan desa di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Memang tidak dapat dinafikan, pandangan sebagian besar masyarakat terhadap Undang-Undang Desa tersebut lebih tertuju kepada alokasi dana desa yang sangat besar. Padahal isi dari Undang-Undang Desa tidak hanya mengatur perihal dana desa, tetapi mencakup hal yang sangat luas, tetapi perdebatan di berbagai media seolah hanya fokus pada nilai besaran anggaran desa.²

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di jelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. Konsep pengaturan Pemerintahan Desa salah satunya adalah demokratisasi yang bermakna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa. Desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan

²Ni"matul Huda, **Hukum Pemerintahan Desa**, Setara Press, Malang, 2015, Hlm 207.

keputusan-keputusan tanpa intervensi pusat. Perubahan desentralisasi dalam otonomi daerah mengakibatkan perubahan pada pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsep desentralisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah telah menunjuk tiga pola otonomi. Pertama, otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas. Kedua, otonomi kabupaten atau kota sebagai otonomi luas. Ketiga, otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya.

Pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut, Otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa. Kini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa adalah APBDes yang tidak berimbang antara penerimaan dengan pengeluaran. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah desa membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa. Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pedoman pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa

yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.³

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk didalamnya tentang kewajiban oleh pemerintah kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya serta pada akhirnya proses pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut.

Kini pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa salah satunya adalah berasal dari dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10% diperuntukkan bagi desa yang disebut Alokasi Dana Desa. Maksud pemberian Alokasi Dana Desa sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa yang kini digulirkan setiap tahun kepada seluruh desa dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban keuangan merupakan suatu dimensi penting dalam penggunaan keuangan termasuk dana Alokasi Dana Desa.

³Hasman Husin Sulumin, **Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala**, Diakses Melalui <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/viewFile/4246/3161>, Hlm 43.

Pertanggungjawaban ini mengingat bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Sumber Daya Manusia yang mengelola keuangan yang besar tersebut harus dipersiapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana pemerintahan desa.

Dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1(satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dalam tahun berjalan tersebut. Begitu pula Alokasi Dana Desa yang diterima oleh tiap desa yang merupakan salah satu sumber keuangan desa dari bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah kabupaten atau kota pada hekekatnya merupakan stimulan kepada desa agar mampu mengelola Alokasi Dana Desa secara efektif dan efisien. Pengelolaan Alokasi Dana Desa juga harus transparan guna mewujudkan pengembangan, kegiatan masyarakat menuju kemandirian desa.⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa Pasal 10 berbunyi:⁵

- (1) Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

⁴Ibid Hlm 44.

⁵Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

- (2) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat Desa.
- (3) Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.

Berangkat dari Peraturan Menteri diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Publikasi Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa terkait Pengelolaan Dana Desa di Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang

B. Tabel Orisinalitas

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

No	Tahun	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2016	Kiki Debi Sintia Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Toyomerto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah Perencanaan Keuangan Desa Toyomatro Kecamatan Singosari Kabupaten Malang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014? 2. Bagaimana Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Toyomatro Kecamatan Singosari Kabupaten Malang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014? 	Hal ini berbeda dengan penelitian yang penulis bahas, dalam penelitian yang penulis bahas memfokuskan pada bentuk laporan atau media pertanggung jawaban dari kepala desa mengenai pengelolaan

					dana desa
2	2018	MiftahuddinF akultas Ekonomi Universitas Islam Yogyakarta	Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana (Studi Kasus : Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)	1. Bagaimana transparansi dan Akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terkait Dana Desa di Desa Panggunharjo 2. Bagaimana Mekanisme Pengelolaan Dana Desa di Desa Panggunharjo	Di penelitian sebelumnya fokus pada transparansi dana desa sajasedangk an di penulisan ini fokus pada transparasi dan media yang digunakan oleh kepala desa dalam melakukan laporan pertanggung jawaban

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa di desa Bunten Barat Kecamatan Ketapang kabupaten Sampang?
2. Bagaimanakah mekanisme pertanggungjawaban yang ideal dalam laporan kepala desa untuk meningkatkan transparansi kepala desa Bunten Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis implementasi Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa di Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang.
2. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis mekanisme pertanggungjawaban yang ideal dalam Laporan Kepala Desa untuk meningkatkan Transparansi di desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang.

E. Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup signifikan sebagai masukan pengetahuan atau literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian bagi para insan akademik sebagai upaya bagi pembaharuan sistem hukum yang ada di indonesia agar dapat menciptakan mekanisme laporan pertanggungjawaban yang ideal.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan pemahaman penulis terkait dengan mekanisme laporan pertanggungjawaban kepala desa di desa Bunten Barat, menganalisis apa saja hambatannya dan mencari solusi untuk permasalahan tersebut.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi agar lebih memahami Implementasi Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa di Desa Buntan Barat.

3. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan mekanisme laporan pertanggungjawaban yang ideal bagi kepala desa demi mewujudkan asas transparansi.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka menguraikan tentang teori-teori yang relevan dengan penelitian, dimana teori-teori dalam kajian pustaka digunakan sebagai bahan analisa penulis untuk rumusan masalah yang telah disajikan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode Penelitian memuat jenis penelitian yang digunakan, bagaimana penelitian dilakukan, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, definisi operasional, serta sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitiannya.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan berisi uraian tentang hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Di dalam pembahasan, peneliti menguraikan analisis-analisis terhadap rumusan masalah yang telah diangkat, Analisis tersebut terkait dengan:

1. Implementasi Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa di desa buntan barat kecamatan ketapang kabupaten sampang.
2. Mekanisme pertanggungjawaban yang ideal dalam laporan kepala desa untuk meningkatkan transparansi kepala desa buntan barat kecamatan ketapang kabupaten sampang

BAB V : PENUTUP

Bab 5 berisi tentang Kesimpulan dan Saran

Penutup merupakan bagian dan akhir dalam penelitian. Bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis terkait permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Definisi pengertian tentang transparansi publik dikemukakan oleh beberapa ahli sebagaimana mana berikut:

- a) Menurut Andrianto menyatakan bahwa Transparansi adalah sebagai berikut:

Keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.

- b) Menurut Hafiz menyatakan bahwa transparansi adalah sebagai berikut :

Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses informasi

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah tersebut.⁶

B. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Dalam perspektif hukum administrasi, sebagaimana telah dikemukakan oleh J.B.JM ten Berge bahwa pengawasan merupakan bagian yang penting dalam penegakan hukum administrasi (*administrative rechthanbaving*). Pengawasan merupakan penegakan hukum preventif yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi. Melalui pengawasan dapat diketahui lebih dini adanya pelanggaran sehingga dapat dihindarkan akibat yang lebih fatal. Sebelum timbul dampak yang lebih besar dari pelanggaran yang terjadi, dapat segera dihentikan melalui instrumen pengawasan.⁷

Dalam perspektif hukum tata negara, pengawasan merupakan bagian dari mekanisme *cheks and balance* antar lembaga negara. Dikemukakan La ode Husen bahwa landasan teoritis dari pengawasan adalah teori negara hukum, teori demokrasi dan teori pemisahan kekuasaan yang merupakan landasan dari sebuah sistem ketatanegaraan. Hakikat dari pengawasan adalah pembatasan kekuasaan yang merupakan inti dari paham konstitusionalisme, dan negara hukum. Bahkan pengawasan merupakan ciri kehidupan bermasyarakat, dan bernegara yang demokratis. Keterkaitan antara negara hukum dengan pengawasan menjadi semakin jelas karena keberadaan sarana kontrol atas

⁶ Nico Andrianto, **Transparasidan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government**, Malang, Bayumedia Publishing, 2007, hlm 20.

⁷ Muhdar dan Anshar, **Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah**, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hlm 28.

tindakan penguasa atau pemerintah menjadi elemen pokok dalam konsepsi negara hukum.⁸

Dalam konsepsi negara demokrasi, pengawasan juga mendapatkan tempat yang sentral. Utamanya dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap pemerintah oleh rakyat. Sebagaimana telah dipahami bahwa hakekat demokrasi adalah pemerintahan yang didasarkan atas kehendak rakyat, bukan atas kehendak penguasa. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, oleh karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat.⁹

C. Penilaian Kinerja Kepala Desa

Pemerintah sebagai organisasi pelayanan masyarakat ada prakteknya tidak terlepas dari ketidaktertiban. Untuk mekanisme pemerintahan dengan sendirinya memerlukan kontrol berupa pengawasan yang berfungsi mengawasi sekaligus memberikan arahan tentang apa yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat. Nawawi menerangkan bahwa Administrasi atau manajemen pemerintahan harus mewujudkan terlaksananya tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.

Pengawasan dalam organisasi pemerintahan diperlukan agar organisasi pemerintahan dapat bekerja efektif, efisien dan ekonomis. Pengawasan ini merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan pemberdayaan

⁸Ibid Hlm 29.

⁹Galang Asmara, **Omdusman Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia**, Laksbang, Yogyakarta, 2005, Hlm 38.

aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.¹⁰

Oleh karena itu untuk mengetahui kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan desa, maka harus dibentuk beberapa kriteria kerja kepala desa. Hal ini guna mempermudah masyarakat dalam melakukan *controlling* terhadap kinerja kepala desa yang juga dapat dikategorikan sebagai organisasi publik dalam skala desa.

Agus Dwiyanto mengemukakan ukuran dari tingkat kinerja suatu organisasi publik secara lengkap sebagai berikut :

a. Produktivitas

Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antar input dan output. Konsep produktivitas ini kemudian dirasa terlalu sempit dan *General Accounting Office*(GAO) mencoba mengembangkan suatu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik memiliki pengaruh terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk mengetahui tingkat kinerja pemerintah dapat di lihat dari seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

b. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan

¹⁰ R Yusuf, **Analisis Pengawasan Dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah**, diakses melalui [Http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/Publika/article/download/583/364](http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/Publika/article/download/583/364), pada tanggal 20 Agustus 2018, Hlm 1.

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini merujuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kinerja organisasi publik tidak hanya dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah seperti pencapaian target, tetapi juga harus dinilai dari ukuran eksternal seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.¹¹

D. Mekanisme Pengawasan Keuangan

Pada hakikatnya, mekanisme keuangan negara dapat di bedakan atas dua hal, yaitu pengawasan intern dan pengawasan ekstren. Pengawasan intern meliputi pengawasan supervisi (*built in control*), pengawasan birokrasi serta pengawasan melalui lembaga-lembaga pengawasan *intern*. Pada pengawasan supervisi (pengawasan atasan terhadap bawahan) masing-masing pimpinan setiap unit diwajibkan melakukan pengawasan keuangan negara terhadap para bawahan yang menjadi tanggung jawabnya. Adanya pengawasan yang

¹¹Fransiska M Mega, **Kinerja Kepala Desa Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Masyarakat Di Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Miahasa Selatan**, diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/viewFile/7819/7382>, pada Tanggal 20 Agustus 2018, Hlm 6.

dilakukan secara bertingkat ini, diharapkan adanya penyimpangan dari kebijakan (ketentuan) yang telah ditetapkan dapat diketahui sedini mungkin.

Adapun pengawasan birokrasi, yaitu pengawasan melalui sistem dan prosedur administrasi. Perlu diketahui bahwa negara kita masih menggunakan sistem anggaran garis (*line budgeting System*) atau disebut sistem anggaran tradisional. Sistem ini hanya menitikberatkan pada segi pelaksanaan dan pengawasan anggaran. Dari segi pelaksanaan yang dipentingkan adalah kesesuaian (*compliance*) antara besarnya hak dengan objek pengeluaran dari tiap-tiap departemen atau lembaga negara. Adapun dari segi pengawasan yang dipentingkan adalah keshahihan (*Validitas*) bukti-bukti transaksi atas pembelanjaan anggaran tersebut. Sistem pembukuan yang berlaku di negara kita masih menggunakan sistem administrasi kas yaitu menerapkan tata buku tunggal (*single entry bookkeeping*) berdasarkan metode dasar tunai (*Cash basis*).

Oleh karena itu, yang langsung dapat diketahui adalah masalah transaksi kas atau penerimaan dan pengeluaran kas saja, sehingga untuk mengetahui prestasi (Kinerja) yang dicapai di balik hasil transaksi kas tersebut diperlukan analisis lebih lanjut. Hal ini untuk mengetahui apakah transaksi kas tersebut telah efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.¹²

1. Pengawasan Dana Desa Oleh Masyarakat

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa,

¹²Adrian Sutedi, **Hukum Keuangan Negara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm 263.

khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹³

a. Pengaturan tentang desa diperlukan untuk:

1. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa
2. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya, masyarakat desa
3. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa
4. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa
5. Memajukan perekonomian masyarakat desa, dan
6. Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.¹⁴

b. Asas-asas pemerintahan desa

1. Rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul
2. Kebersamaan yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerjasama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan ditingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa
3. Subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa
4. Keberagaman yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

¹³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, **Dana Desa**, diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>, pada tanggal 2 September 2018, hlm 3.

¹⁴ Ibid hlm 7.

5. Kegotong-royongan yaitu kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun desa
6. Kekeluargaan yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa
7. Musyawarah yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan
8. Demokrasi yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang di butuhkan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keseluruhan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa diakui, ditata dan dijamin
9. Kemandirian yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri
10. Partisipasi yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan
11. Kesetaraan yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran
12. Pemberdayaan yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa
13. Keberlanjutan yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunann desa.¹⁵

¹⁵Ibid hlm 8.

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini mengandung arti bahwa setiap penyelenggaraan negara wajib untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aspirasi dan tuntutan hati nurani rakyatnya. Untuk mewujudkan kedaulatan tersebut salah satu cara yang dapat dilakukan ialah dengan mengatur peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme. Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan dapat lebih antusias melakukan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan negara dengan tetap menaati rambu-rambu hukum yang berlaku.

- c. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara dilaksanakan dalam bentuk:
1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggara negara
 2. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara
 3. Hak menyampaikan sara dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara
 4. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan hak-haknya tersebut diatas.¹⁶

Menurut Merriam Webster's Dictionary, partisipasi berasal dari bahasa ingris yaitu *participate*. Kata itu mengandung dua pengertian: pertama, memiliki sejumlah atribut, benda atau kualitas dari seseorang. Kedua,

¹⁶Ibid Hlm 262.

mengambil bagian dalam suatu kegiatan atau membagi sesuatu dalam kebersamaan, maka dengan demikian yang dimaksud dengan partisipasi publik disini adalah banyaknya masyarakat yang mengambil bagian dan terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan konkret, termasuk dalam hal pembentukan pengawasan (*control*) maupun keterlibatan dalam proses perancangan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah (*law making process*). Berbagai bentuk partisipasi publik dalam arti luas, dalam pemerintahan daerah berdasarkan pengalaman berbagai negara di dunia menurut Norton, berkisar pada:

1. Referenda bagi isu-isu vital di daerah tersebut dan penyediaan peluang inisiatif warga untuk memperluas isi-isu yang terbatas dalam referenda
2. Melakukan *desentralization in cities* (desentralisasi di dalam kota) kepada unit-unit yang lebih kecil sehingga kebutuhan tanggung jawab dan pengambilan keputusan lebih dekat lagi kepada masyarakat.
3. Konsultasi dan kerjasama dengan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.
4. Partisipasi dalam bentuk *elected member* (anggota yang dipilih).¹⁷

Partisipasi merupakan suatu pendekatan pembangunan yang mengakui kebutuhan untuk melibatkan masyarakat terutama dalam mendisign dan implementasi kebijakan yang mempengaruhi keadaan lingkungan masyarakat sendiri. Pada saat ini sistem pemerintahan daerah yang dijalankan sebagai sebagai satu kesatuan organisasi kenegaraan banyak mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat sangat perlu tetapi pelaksanaan partisipasi masih bersifat mengiyakan keputusan birokrasi

¹⁷Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, **Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah**, UB Press, Malang, 2011, hlm 121.

yang ada dan bukan sebagai pengambil keputusan tetapi sebagai pelaksana dari keputusan yang telah ditetapkan.¹⁸

Pada pelaksanaan pemerintahan desa pengambilan keputusan harus didasarkan pada hak-hak-hak masyarakat yang telah diatur di dalam Undang-Undang Desa.

d. Hak-hak warga/masyarakat desa yang dijamin dalam Undang-Undang Desa, di antaranya ditegaskan dalam Pasal 68 yang menyatakan bahwa:

- (1) Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- (2) Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- (3) Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- (4) Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 - a. Kepala Desa
 - b. Perangkat Desa
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - d. Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman, dan ketertiban di Desa.¹⁹

¹⁸Ibid hlm 122.

¹⁹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tabel 2. Peran dan Keterlibatan Masyarakat dalam Rancangan APBDes

TAHAPAN	PERAN DAN KETERLIBATAN	ASAS
Perencanaan	Memberikan masukan tentang rancangan APB Desa kepada Kepala Desa dan/atau BPD	Partisipatif
Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama dengan Kepala Seksi, menyusun RAB, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mengelola atau melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa. 2. Memberikan masukan terkait perubahan APB Desa 	Partisipatif Transparan
Penatausahaan	Meminta informasi, memberikan masukan, melakukan audit partisipatif	Transparansi, Akuntabel, Tertib, dan disiplin anggaran
Pelaporan dan Pertanggung-jawaban	Meminta informasi, mencermati materi LPj, Bertanya atau meminta penjelasan terkait LPj dalam Musyawarah Desa	Partisipatif Transparan Akuntabel

Sumber: *Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam menganalisa rumusan masalah pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain lain. Kajian ini bersifat deskriptif. Dengan kata lain kajian empiris mengkaji *law in action*.²⁰ Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau dampak dari ketentuan hukum positif dengan melihat secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan ialah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju penyelesaian masalah.²¹

3. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar diambilnya lokasi tersebut sebagai tempat penelitian, di antaranya ialah:

1. Desa Bunten Barat merupakan desa yang kurang berkembang dalam hal administratifnya (transparansi anggaran desa)
2. Minimnya partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

²⁰ Achmad Ali dan Wiwie Haeryani, **Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum**, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 2.

²¹ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UII Press, 1981, hlm 43.

4. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam mengkaji sebuah penelitian ialah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya berdasarkan fakta-fakta sosial yang terkait langsung dengan bekerjanya hukum dalam masyarakat *das sein*²². Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Kepala Desa Buntén Barat, Sekretaris Desa Buntén Barat, Badan Permusyawaratan Desa Buntén Barat dan Masyarakat Desa Buntén Barat.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara tidak langsung yang dapat mendukung data primer berupa dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa
- d. Peraturan Desa Buntén Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
- e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
- f. Hasil penelitian terdahulu, jurnal, internet dan buku-buku.

²²Muktie Fajar, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm 59.

2) Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang penulis peroleh secara langsung dengan melakukan wawancara kepada Kepala Desa Bunten Barat, Sekretaris Desa Bunten Barat, Badan Permusyawaratan Desa Bunten Barat dan Masyarakat Desa Bunten Barat
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang penulis peroleh dari hasil penelusuran masalah yang bersumber dari:
 1. PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
 2. Website internet.

5. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek pengamatan penelitian. Dalam hubungannya dengan permasalahan pada penelitian maka yang diambil adalah Perangkat Desa yaitu Kepala Desa Bunten Barat, Sekretaris Desa Bunten Barat, Badan Permusyawaratan Desa Bunten Barat, dan Masyarakat Desa Bunten Barat

2) Sampel

Sampel adalah sebagian data yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu yang mewakili populasi. Teknik *sampling* adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif.²³ Sedangkan *Random Sampling* dinyatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Untuk memperoleh data

²³Margono, **Metodologi Penelitian Pendidikan**, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 10.

yang diinginkan, maka penulis melakukan wawancara kepada Perangkat Desa yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Desa Bunten Barat Yaitu H.A.Sukaryadi.AS, Sekretaris Desa Bunten Barat yakni Badrut Tamam, Badan Permusyawaratan Desa yakni Zahri, dan Masyarakat di Desa Bunten Barat, Untuk wawancara yang akan dilakukan kepada masyarakat peneliti mengambil sampel 5 orang yang terdiri dari unsur Tokoh masyarakat (Moh Sun), Guru (Edi), Petani (Saleh), Pedagang (Wiwik), Ibu Rumah Tangga(Luluk Mukarromah) ke 5 responden itu ialah orang yang dimintai informasi terkait dengan Transparansi Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Bunten Barat.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengumpulan data primer

Menggunakan data primer dikumpulkan dengan cara wawancara secara langsung dengan narasumber terkait, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya oleh penulis berupa kuisisioner, selain itu penulis juga menggunakan wawancara yang bersifat terbuka, dimana nantinya pertanyaan akan disesuaikan dengan kondisi lapangan pada saat itu, penulis berharap hasil wawancara tersebut dapat menjadi sebuah alat untuk menganalisis dalam mengkaji permasalahan yang ada.

b. Pengumpulan data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan dokumen serta peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, jurnal, internet dan buku-buku yang terkait dengan tema pembahasan pada penelitian ini

7. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

8. Definisi Operasional

- 1) Implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.²⁴

- 2) Laporan Kepala Desa

Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa Bunten Barat kepada Bupati Sampang melalui Camat Ketapang.

- 3) Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyaraat, dan kemasyarakatan.

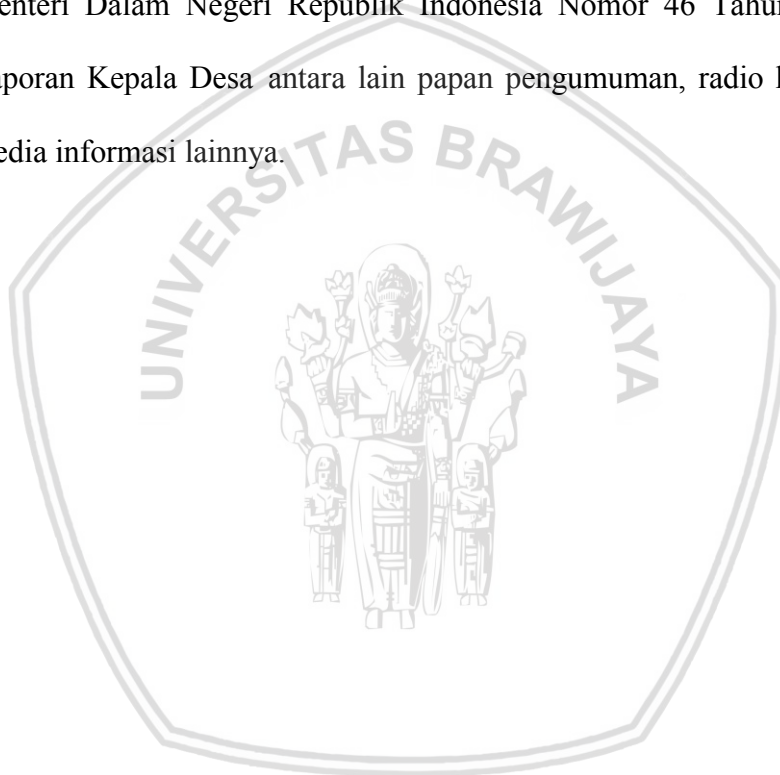
²⁴Musta'in, *Landasan Teori*, diakses melalui <http://eprints.stainkudus.ac.id/306/5/5.%20%20MUSTA%27IN%20BAB%202.pdf>, pada tanggal 04 September 2018.

4) Transparansi Dana Desa

Transparansi Dana Desa adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Kepala Desa Buntan Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.

5) Media Informasi

Media informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Desa Buntan Barat merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur.

1. Perkembangan Kependudukan

a. Jumlah Penduduk

Tabel 3. Jumlah Penduduk

Laki-laki	Perempuan
3875 orang	3915 orang

sumber: data primer, diolah 2019

b. Jumlah Keluarga

Tabel 4. Jumlah Keluarga

KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
1022 KK	446 KK	1468 KK

Sumber : data primer, diolah 2019

2. Ekonomi Masyarakat

a. Pengangguran

Tabel 5. Pengangguran

1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	1064 orang
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	1075 orang
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	700 orang
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	500 orang

5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	3154 orang
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	200 orang
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	100 orang

Sumber: *data primer, diolah 2019*

b. Kesejahteraan Keluarga

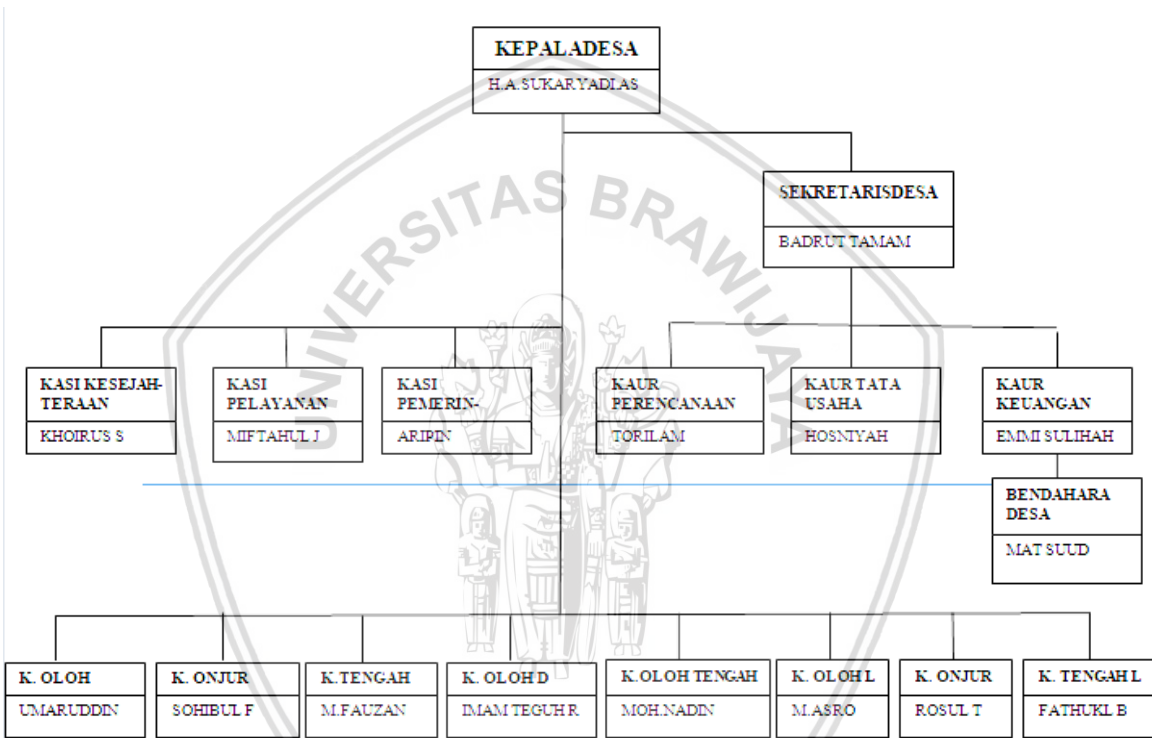
Tabel 6. Kesejahteraan Keluarga

1. Jumlah keluarga prasejahtera	300 Keluarga
2. Jumlah keluarga sejahtera 1	534 Keluarga
3. Jumlah keluarga sejahtera 2	334 Keluarga
4. Jumlah keluarga sejahtera 3	120 Keluarga
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	180 Keluarga
6. Total jumlah kepala keluarga	1468 Keluarga

Sumber: *data primer: diolah 2019*

3. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Buntan Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang

Bagan 1. Susunan Organisasi



Sumber: data primer, diolah 2019

B. Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa terkait dengan Penggunaan Dana Desa di Desa Buntan Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa peraturan tentang Desa, yaitu: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974

tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diganti dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.²⁵

Pemerintahan Desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Penerapan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diterbitkan lagi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan pemerintah supradesa, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa. Perubahan kearah interaksi yang demokratik itu terlihat dari beberapa fenomena, diantaranya: (1) Dominasi peran birokrasi mengalami pergeseran digantikan dengan menguatnya peran institusi adat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari; (2) Semangat mengadopsi demokrasi *delegatif-liberatif* cukup besar dalam Undang-Undang yang baru. Misalnya, dengan hadirnya BPD atau yang disebut Badan Permusyawaratan Desa. Dimana badan legislatif baru ini berperan sebagai pengayom adat istiadat, membuat Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan (3) semangat partisipasi masyarakat sangat ditonjolkan. Artinya proses politik, pemerintahan dan pembangunan di desa tidak lagi

²⁵ Moch. Solekhan, **Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat**, Malang, Setara Press, 2014, hlm 14.

bermuara dari kebijakan pemerintah pusat secara terpusat (*top-down*), melainkan berasal dari partisipasi masyarakat.

Bertitik tolak pada semangat reformasi sistem pemerintahan desa, maka struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkat pemerintah, khususnya Pemerintahan Desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi. ²⁶ Pasal 4, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa:

“Pengaturan Desa bertujuan: a) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; c) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; d) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk Pengembangan Potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; e) membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; f) meningkatkan pelayanan public bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; g) meningkatkan pelayanan public bagi warga masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan social sebagai bagian dari ketahanan nasional; h) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan i) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan”. ²⁷

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur mengenai beberapa hal yaitu:

1. Inti demokrasi ekonomi itu adalah redistribusi kepada sebesar-besarnya rakyat, Undang-Undang desa ini meredistribusikan keuangan negara kepada lapisan rakyat terbawah, yaitu masyarakat desa
2. Konsolidasi anggaran desa agar efisien dan mencegah korupsi akibat kebijakan anggaran sektoral

²⁶Ibid, hlm 15.

²⁷Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

3. Konsolidasi kelembagaan yang mengurus desa, dari 14 kementerian sektoral menjadi 1 kementerian yaitu kementerian desa.
4. Menempatkan masyarakat desa sebagai subjek trisakti berdaulat dibidang politik, ekonomi dan berkepribadian indonesia (gotong-royong).
5. Skema alokasi, dan besaran dana untuk desa sebagai usaha membagikan keadilan bagi rakyat terbanyak di Indonesia yaitu 72.944 Desa.
6. Jalur birokrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan desa dengan memangkas jalur birokrasi yang panjang dan penuh negosiasi, sektoral dan parsial, menjadi pola 1 pintu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan desa sehingga pembangunan desa berjalan komprehensif. Inilah Konsolidasi dana desa.²⁸

1. Konsolidasi Dana Desa

Konsolidasi Dana Desa dilakukan melalui kebijakan Dana Alokasi Desa (DAD). DAD berasal dari APBN melalui dana-dana Kementerian sektoral yang sebelumnya dikelola secara sektoral dan parsial, kini dikonsolidasi menjadi satu pintu anggaran alokasi dana desa.

Skema baru dalam UU Desa ini akan memangkas jalur birokrasi perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan akses anggaran pembangunan desa yang panjang dan penuh negosiasi.

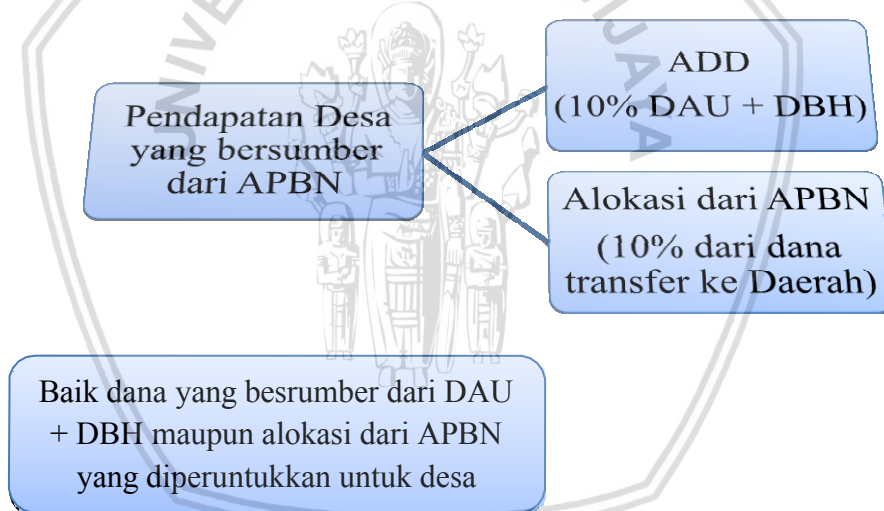
Dana Desa berdasar UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

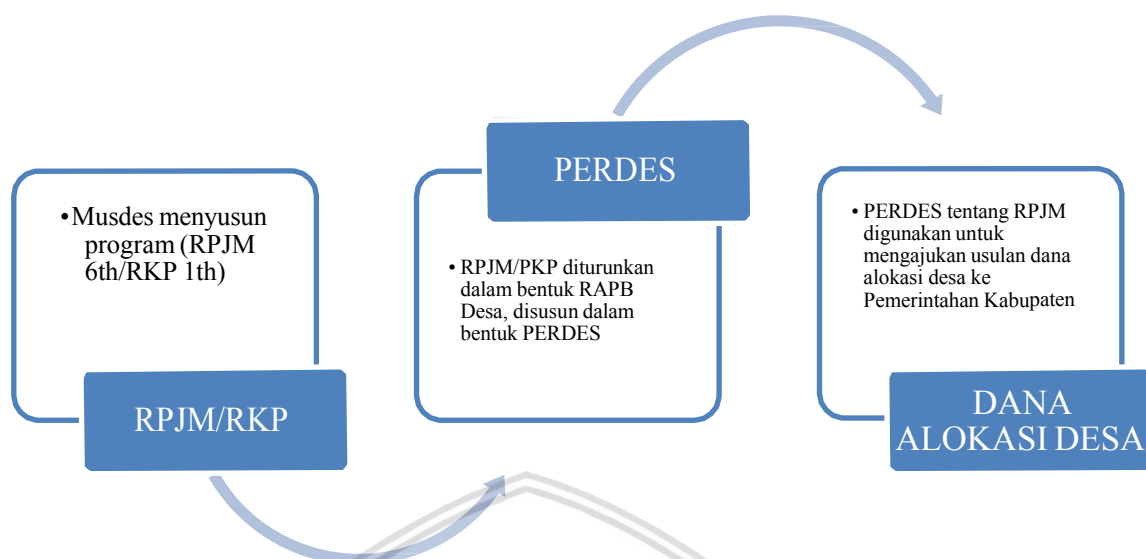
²⁸Budiman Sudjatmiko dan Yando Zakaria, **Desa Kuat Indonesia Hebat**, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015, hlm 10.

- a. 10% dari dana transfer ke daerah
- b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / kota;
- c. 10% dari pajak dan retribusi daerah
3. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten / kota;
 - a. 10% dari DAU + DBH
4. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota;
5. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga ; dan

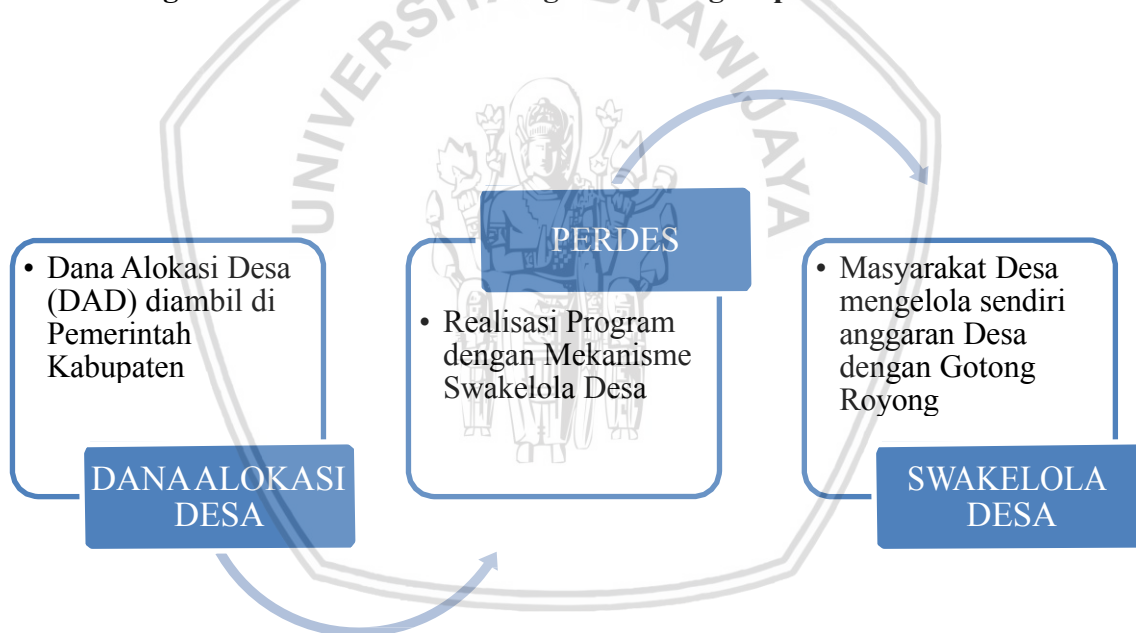
Bagan 2. Sumber-Sumber Pendapatan Desa dari Pemerintah yang Dimandatkan UU Desa & Terus-Menerus



Bagan 3. Pola Baru Pembangunan Desa: Jalur Singkat Perencanaan Desa



Bagan 4. Pelaksanaan Pembangunan: Mengadopsi Swakelola Desa



2. Keberagaman Desa dan Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Nasional

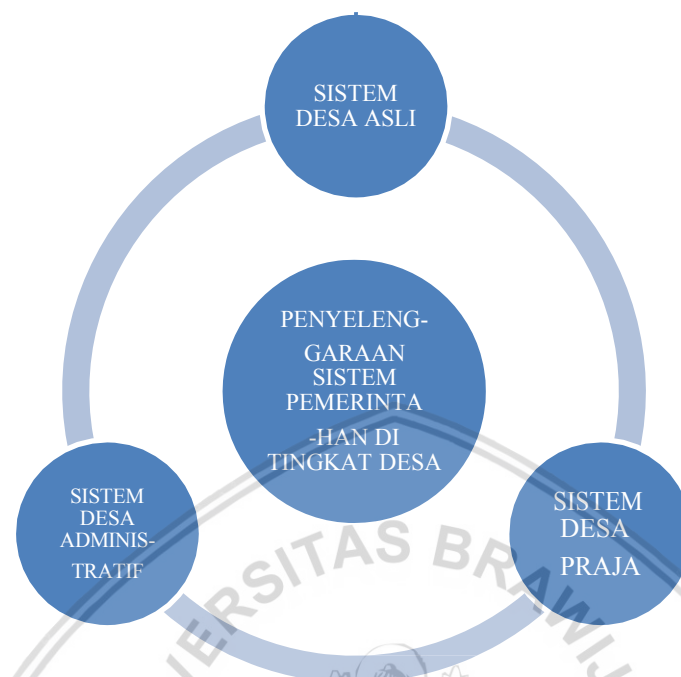
Dalam rangka menyusun kebijakan yang mengatur urusan pemerintahan dan pembangunan yang mampu mengakomodasi keberadaan desa yang beragam itu, saya mengusulkan 3 (tiga) *alternative* pilihan yang dapat ditempuh sesuai kebutuhan di

daerah atau bahkan kebutuhan di tingkat desa masing-masing. Ketiga pilihan itu adalah, (1) penyelenggaraan system pengurusan hidup bersama yang berbasis pada system organisasi adat yang ada atau yang disebut *self governing community*; (2) system desa administrative (*local state government*); dan (3) system desa otonom (*local self government*). Pemilihan atas satu tipe tergantung pada keputusan daerah dan masyarakat setempat, berdasarkan kenyataan lapangan yang ada.

Dalam konteks kebijakan yang akan ditetapkan, ketiga model itu terpilah ke dalam 3 bentuk. Masing-masing adalah system desa asli atau adat, system desa praja, dan system desa administratif.²⁹ Penyelenggaraan masing-masing pilihan akan berbeda satu dengan yang lainnya. Terutama yang menyangkut tiga hal penting: (a) nomenklatur atau istilah-istilah desa dan lembaga-lembaga local; (b) kewenangan desa, dimana desa-desa dan lembaga-lembaga local; (b) kewenangan desa, dimana desa-desa diluar jawa mempunyai tradisi yang kuat dalam hal kewenangan peradilan adat; dan (c) struktur dan organisasi pemerintahan desa. Semua ini dipengaruhi oleh sejarah yang sangat beragam.

²⁹ Konsepsi Desapraja, yang dimaksudkan dalam dokumen ini berbeda bentuknya dengan penyebutan yang sama pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1995 tentang Desapraja.

Bagan 5. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan di Desa



Pilihan model pertama adalah implementasi penuh dari asas rekognisi (pengakuan dan penghormatan terhadap hak asal usul desa yang bersangkutan); oleh karenanya desa mempunyai kewenangan yang bersumber dari asal usul yang menyangkut system social dan budaya, system politik dan hukum melalui institusi demokrasi komunitarian (musyawarah); serta pengaturan penguasaan sumber-sumber agraria yang menjadi basis material asli ini. Implikasi lain dari pilihan ini adalah desa mengelola urusan-urusan masyarakat yang berskala local; keberadaan relative otonom; memperoleh tugas-tugas administrasi dari Negara yang sangat terbatas sifatnya; meski tidak tertutup kemungkinan untuk tetap menerima aliran dana Negara melalui berbagai mekanisme keuangan yang ada sebagai implikasi keberadaan desa sebagai bagian dari Negara itu sendiri.

Pilihan kedua adalah model desa administrative, atau sebutan lainnya adalah desa korporatis (*local state government*). Desa administrative adalah unit birokrasi

sebagai kepanjangan tangan Negara di tingkat lokal. Asas yang berlaku dalam model ini adalah delegasi atau tugas pembantuan. Pada model ini desa menjalankan tugas-tugas administrative dan pelayanan yang ditugaskan pemerintah. Implikasinya adalah desa tidak mempunyai institusi demokrasi dan tidak ada otonomi. Untuk menyelenggarakan kegiatannya desa administratif menerima dana belanja aparatur dari pemerintah. Model ini dapat diambil pada situasi dimana pemilihan desa adat dan/atau desapraja tidak dapat dilakukan. Misalnya di daerah remote di mana perkembangan masyarakat hukum adatnya belum mencapai system pengorganisasian yang bersifat territorial. Sementara pilihan untuk menjadi desapraja juga rawan dominasi oleh kelompok-kelompok masyarakat dominan lainnya.

Model yang ketiga adalah model desa otonom, atau sering pula disebut sebagai (*local self government*). Desa otonom adalah unit pemerintahan lokal otonom yang berada dalam subsistem pemerintahan NKRI. Status desa tidak ubahnya seperti daerah otonom. Dalam model ini pemerintahan memberikan desentralisasi (penyerahan) urusan-urusan menjadi kewenangan desa. Sebagai daerah otonom desa juga mempunyai institusi politik demokrasi modern (electoral dan perwakilan). Pemerintah wajib mengalokasikan (alokasi) anggaran untuk membiayai pelaksanaan kewenangan/urusan. Sampai tahap tertentu, perangkat desa pun bisa menjadi PNS. Meskipun undang-undang mengizinkan operasionalisasi hak-hak desa secara beragam, tetap harus ada standar-standar yang berlaku umum. Undang-Undang sebaiknya juga menjunjung standar universal yang harus ada dalam setiap opsi. Dengan demikian, apa pun pilihannya nanti, desa harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, pluralisme, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Nilai-nilai universal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya feodalisme dalam tata pemerintahan desa. Untuk itu, pemerintahan sebaiknya memberikan gambaran yang

cukup memadai tentang karakter dan desain kelembagaan masing-masing tipe/pilihan. Jika perlu, memberikan kesempatan transisional yang cukup, misalnya sekitar dua tahun, bagi desa-desa yang terlanjur ada sekarang ini untuk memilih pilihannya yang tepat.³⁰ untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik maka penyelenggaraan desa harus didasarkan pada Perspektif *Good Governance*.

3. Pemerintahan Desa dalam Perspektif *Good Governance*

a. Konsepsi *Good Governance*

Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa adalah bagaimana pembangunan atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misalnya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Karena itu, pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasyid, bahwa hakekat keberadaan pemerintahan dan birokrasi itu adalah dalam rangka menjalankan tugas memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Pola-pola pembangunan yang sentralistik dipandang sudah tidak relevan, sehingga diperlukan pendekatan desentralistik. Dalam pendekatan desentralistik tersebut, pemerintah berperan dan bertindak sebagai pengatur (regulator) dan fasilitator guna membangun iklim yang kondusif dalam mewadahi proses interaksi kehidupan social politik dan ekonomi masyarakat. Sejarah telah membuktikan, bahwa selama Orde Baru, harapan yang besar dari pemerintah daerah untuk dapat

³⁰Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria (KARSA), 2012. Menggagas „RUU Desa atau disebut dengan nama lain” yang menyembuhkan Indonesia: Pandangan dan Usulan Lingkar untuk Pembaruan Desa dan Agraria (KARSA) untuk Penyempurnaan „RUU Desa” yang diajukan oleh pemerintah tahun 2012. Disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum yang diselenggarakan Panitia Khusus (PANSUS) RUU Desa DPRRI, Jakarta, tanggal 20 Juni 2012, sebagaimana bisa diakses pada http://www.academia.edu/3463510/Menggagas_RUU_Desa_ya ng_Menyembuhkan_Idonesia.

melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri dari tahun ke tahun tidak pernah menjadi kenyataan.

Kebijakan otonom daerah tersebut tentunya juga berimplikasi terhadap system administrasi pemerintahan desa. Artinya, kependudukan desa sebagai subsistem pemerintahan terendah dalam system pemerintahan nasional di Indonesia memerlukan adaptasi dan antisipasi terhadap perkembangan tersebut. Salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di tingkat Desa.³¹

b. Karakteristik *Good Governance*

Terkait dengan karakteristik *good governance*, Bhatta menyebutkan ada 4 unsur utama yang terkandung didalamnya, yaitu: “(1) *accountability* (akuntabilitas), (2) *transparency* (transparansi), (3) *openness* (keterbukaan), dan (4) *rule of law* (aturan hukum).”³² Ganie-Rochman juga menyebutkan ada 4 unsur utama yang terkandung di dalam pengertian *good governance*, yakni: “(1) akuntabilitas, (2) kerangka hukum, (3) Informasi, dan (4) transparansi.”³³

Dalam perkembangan selanjutnya, UNDP sebagaimana yang diikuti oleh Lembaga Administrasi Negara dalam Joko mengajukan 9 karakteristik *good governance* sebagai berikut:

- a. ***Participation***. Setiap warga Negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun

³¹Op. cit Moch. Solekhan, **Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat**, hlm 22.

³²Gambhir Bhatta, “*Capacity Building at the Local Level for Effective Governance*, Empowerment Without Capacity is Meaningless”, 1996, hlm 7.

³³Ganie-Rochman, “*Good Governance “Prinsip, Komponen dan Penerapannya”*”, dalam HAM: **Penyelenggaraan Negara Yang Baik dan Masyarakat Warga**, KOMNAS HAM, Jakarta, 2001, 26.

- atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b. **Rule of Law.** Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
 - c. **Transparancy.** Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat difahami dan dapat dimonitor.
 - d. **Responsivines.** Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*.
 - e. **Consensus Orientation.** *Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
 - f. **Equity.** Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
 - g. **Effectiviness and efficiency.** Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.
 - h. **Accountability.** Para pembuatkeputusan dalam pemerintahan, sector swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada public dan lembaga-lembaga "*stakeholders*". Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

- i. **Strategic Vision.** Para pemimpin dan public harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.”³⁴

c. Pemerintahan Desa dalam Perspektif *Good Governance*

Pemerintahan desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses social didalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan social yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman, dan berkeadilan. Sebagaimana diungkapkan oleh Dwipayana bahwa “pemerintahan desa yang demokratis (*partisipatif, akuntabel, transparan, dan responsive*) bisa semakin kokoh, *legitimate*, dan mampu bekerja secara efektif bila diitopang dengan kesejajaran, keseimbangan, dan kepercayaan antar elemen *governance* di desa.” Guna mewujudkan tugas tersebut pemerintah desa dituntut untuk melakukan perubahan yang serius, apakah dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna sehingga kinerja pemerintah desa benar-benar semakin mengarah pada praktek *good governance* bukan *bad governance*.³⁵

Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah pada tata pemerintahan yang baik (*good governance*) tersebut juga diungkapkan Syamsuddin bahwa “*Good Governance* mengarahkan kepada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintahan sehingga kinerjanya menjadi lebih baik”. Dengan demikian, untuk mendorong terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik seharusnya diletakkan pada dua level. Pertama, di level desa perlu dibangun *good governance* yang memungkinkan keterlibatan seluruh elemen desa

³⁴ Joko Widodo, ***Good Governance***, Surabaya, Insan Cendikia, 2001, hlm 26.

³⁵ Dwipayana dan Eko S, ***Membangun Good Governance di Desa***, Yogyakarta, IRE Press, 2003, hlm

dalam urusan public, penyelenggaraan pemerintahan, dan merumuskan kepentingan desa. Sebab demokratisasi proses penyelenggaraan pemerintahan desa bisa terbentuk melalui perluasan ruang public, pengaktifan kelompok-kelompok social dan forum-forum warga serta jaringan antar kelompok, yang bukan saja untuk keperluan *self help* kelompok, tetapi juga sebagai wahana *awaranness* warga, *civic engagement* dan partisipasi dalam urusan pemerintahan di tingkat komunitas.³⁶ Dengan berbasiskan pada model ini, maka pembuatan keputusan dan rumusan kepentingan desa tidak ditentukan oleh elite desa yang terbatas, melainkan dilakukan oleh komunitas desa secara partisipatif. Ditegaskan oleh Syamsuddin bahwa “dalam *good governance* tidak lagi pemerintah (*state*), tetapi madani (*civil society*) dan terutama sector swasta (*privat sector*) yang berperan dalam pemerintahan (*governance*)”.³⁷

Selain itu, dalam konsep *good governance*, pemerintah desa merupakan salah satu elemen (*stakeholder*) dari sekian banyak *stakeholder* dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. *Stakeholder* yang lain tersebut adalah BPD (sebagai representasi masyarakat politik), public sector (elemen masyarakat sipil, seperti: desa adat, LSM, dan kelompok-kelompok social), serta private sector (elemen masyarakat ekonomi). Dalam pergeseran paradigmatik dari konsep *government* ke *governance* tersebut, maka proses penyelenggaraan pemerintahan desa seharusnya bersendikan pada *trustee* (saling kepercayaan), dan *partnership* (kemitraan) antar elemen dalam masyarakat (*stakeholders*). Karena bagaimanapun, setiap persoalan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dipecahkan hanya oleh pemerintah desa semata. Oleh karena itu, pemerintah

³⁶Lukman Syamsudin, *Manajemen keuangan perusahaan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007, hlm 65.

³⁷Ibid, hlm 50.

desa harus bekerjasama dengan elemen masyarakat yang lain berdasarkan prinsip kemitraan.

Untuk mengetahui apakah saat ini penyelenggaraan pemerintahan desa sudah berjalan dengan demokratis dan transparan maka penulis melakukan Wawancara pada tanggal 15 Maret 2019 kepada Perangkat Desa yang diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, sedangkan pembagian kuisisioner kepada Masyarakat di desa Buntan Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dilakukan pada tanggal 16 Maret 2019.

Kuisisioner tersebut diserahkan kepada 5 responden yaitu: Saleh, Wiwik, Luluk Mukarromah, Moh Sun, dan Edi. adapun hasil dari Kuisisioner tersebut ialah:

Tabel 7. Hasil Kuisisioner pada Masyarakat

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	
		IYA	TIDAK
1	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang adanya dana desa	4	1
2	Apakah bapak/ibu mengetahui jumlah dana desa setiap tahunnya.	1	4
3	Apakah selama ini bapak/ibu merasakan manfaat dari adanya dana tersebut ?	4	1
4	Apakah selama ini ada bentuk fisik seperti jalan, atau bangunan yang di bangun oleh kepala desa dari dana desa tersebut ?	2	3
5	Apakah bapak/ibu pernah di libatkan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Desa	1	4
6	Apakah bapak/ibu pernah melihat adanya baleho yang menguraikan tentang Rancangan Anggaran Belanja Desa	0	5
7	Apakah bapak/ibu pernah mengetahui adanya laporan pertanggung jawaban kepala desa terkait pelaksanaan dana desa tersebut	3	2

Sumber: *data primer, diolah 2019*

Angka yang terdapat pada kolom adalah jumlah responden yang mengatakan bahwa mereka pernah terlibat dan mengetahui adanya dana desa di Desa Buntan Barat. dari keterangan yang penulis peroleh melalui hasil kuisisioner dapat disimpulkan bahwa di desa Buntan Barat informasi terkait pengelolaan dana desa masih belum transparan hal ini dapat dilihat dari informasi yang disebar kepada masyarakat terkait pengelolaan dana desa belum ada. di dalam Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa di jelaskan bahwa Media informasi yang dapat digunakan untuk menginformasikan penggunaan dana desa kepada masyarakat terdiri dari papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.

Pada saat melakukan studi lapang di desa Buntan Barat penulis tidak menemukan papan pengumuman yang berisikan rincian penggunaan dana desa padahal hal ini harus dilakukan oleh pemerintah desa sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan anggaran dana desa, papan pengumuman ini penting karena tidak hanya berguna untuk media informasi semata lebih dari itu papan pengumuman ini juga dapat dijadikan media pengawasan oleh masyarakat terkait dengan agenda tahunan yang akan diadakan oleh pemerintah desa.

Saat ini masyarakat di desa buntan barat tidak mengetahui tentang jumlah dana desa sehingga kemungkinan penyelewengan mungkin saja terjadi, bahkan jika itupun terjadi masyarakat tidak akan mengetahui hal tersebut mengingat mereka juga tidak pernah di libatkan dalam agenda rancangan anggaran pendapatan belanja desa. Berdasarkan informasi yang penulis dapat pada saat melakukan observasi penulis melihat bahwa kondisi insfrastuktur berupa jalan misalnya masih rusak.

Selain informasi yang penulis dapat melalui hasil kuisisioner, penulis juga melakukan wawancara kepada Perangkat Desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa

dan Badan Permusyawaratan Desa ada beberapa hal yang dapat dijadikan informasi terkait dengan pengelolaan dana desa.

1. Untuk inventarisasi pengelolaan dana desa setiap tahunnya ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di desa Bunten Barat yaitu, mereka melakukan inventarisasi kebutuhan penganggaran melalui hasil musyawarah bersama dengan badan permusyawaratan desa untuk merumuskan rancangan anggaran pendapatan belanja desa, hasil musyawarah kemudian di bukukan di dalam register untuk mempermudah kepala desa dan sekretaris desa dalam hal laporan pertanggung jawaban yang akan dilakukan nya.
2. Selama ini dana desa dialokasikan untuk kebutuhan perogram pemberdayaan masyarakat seperti Karang taruna, sedangkan program pembangunan infrastruktur dilakukan melalui perbaikan jalan, namun pada saat penulis melakukan wawancara ke desa bunten barat kondisi jalan tidak sepenuhnya bagus, terdapat beberapa lokasi yang jalannya masih berlubang.
3. Dalam perumusan RAPBDes, pemerintah hanya melibatkan Badan Permusyawaratan Desa saja, mereka tidak menampung aspirasi masyarakat lainnya, padahal banyak diantara mereka yang mungkin saja dapat memeberikan informasi maupun konsep untuk pembangunan desa kedepannya.
4. Laporan pertanggungjawaban dilakukan kepada bupati atau melalui camat hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, yang menyatakan bahwa:
“Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat”

Hanya saja hal ini tidak di informasikan lebih lanjut kepada masyarakat, padahal mereka berhak mengetahui informasi ini.

5. Tidak adanya baleho atau papan pengumuman di desa buntan barat disebabkan karena ketidaktahuan pemerintah desa terkait dengan keberadaan papan pengumuman, padahal hal ini sudah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.
6. Proses pelaporan dana desa dilakukan melalui camat dan nantinya akan di laporkan kepada bupati, namun sebelum itu SPJ akan di tandatangi terlebih dahulu oleh inspektorat untu dicek bukti pengelolaan dana desa tersebut.
7. Kesulitan dalam melakukan laporan pertanggungjawaban terletak pada kerumitan format SPJ yang harus dibuat oleh pemerintah desa

C. Mekanisme Pertanggungjawaban Yang Ideal untuk Meningkatkan Transparansi Laporan pertanggung jawaban Kepala Desa terkait Pengelolaan Dana Desa

Dalam pelaksanaan model penguatan *good governance* di daerah sasaran program, hambatan-hambatan yang muncul sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari terealisasinya aktivitas program yang telah direncanakan. Kendala-kendala atau hambatan-hambatan bervariasi mulai dari sisi geografis, ketidak pedulian pemerintah kabupaten, rendahnya kualitas sumber daya manusia, sosialisasi yang kurang maksimal, finansial, infastruktur yang kurang memadai dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah kabupaten, pelaksanaan program ini dapat menyumbang secara signifikan dalam konteks pengembangan sumber daya manusia pedesaan. Salah satu faktor penyebab belum berjalannya proses yang mengarah pada terwujudnya otonomi desa adalah kurangnya kemampuan

kabupaten dalam menyebarkan informasi di sekitar isu pembangunan desa dengan paradigma baru sesuai ketentuan normative di tingkat nasional.

Untuk meningkatkan *capacity building* sumber daya manusia di kabupaten maka dirumuskan output berdasarkan tujuan program yang dalam penentuannya didasarkan pada kebutuhan riil dan hasil analisis selama perjalanan, dengan output itu disusun berbagai aktivitas yang mendukung. Adanya output yang didukung oleh berbagai aktivitas ini akan mampu mengarahkan perubahan paradigma pembangunan desa yang berdimensi terwujudnya otonomi desa yang mandiri yang didalamnya terdapat sejumlah kewenangan yang dapat dijalankan dalam mengurus rumah tangga desa.³⁸

Namun karena lemahnya tingkat sosialisasi berbagai instrument hukum tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kurangnya kemauan politik esekutif dan legislative tingkat kabupaten, menyebabkan berbagai ketentuan normatif yang berhubungan dengan hak-hak desa sebagai struktur administrasi terkecil tidak dapat berjalan. Keadaan ini menyebabkan berbagai aktivitas dan output yang telah ditetapkan sedikit mendapat hambatan. Akibatnya wahana otonomi desa yang sudah berjalan di berbagai wilayah di luar Sumatera Utara tidak dapat diwujudkan dalam arti sesungguhnya.

Dari semua output yang sudah dicapai sampai dengan berakhirnya program yang dilaksanakan, dimana masing-masing output didukung oleh berbagai aktivitas yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan akan tetapi belum semua output yang diinginkan dapat dicapai. Hal ini dikarenakan system koordinasi dalam kemitraan yang dijalin khususnya dengan pemerintah kabupaten belum sepenuhnya bersentuhan dengan pengambil keputusan level atas dalam hal ini Bupati.

³⁸ Ananto Basuki dan Sofwan, **Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis *Good Governance***, Sekretariat Penguatan Otonomi Desa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2006, hlm 167.

Sejauh ini kesepahaman dalam memandang berbagai persoalan otonomi desa lebih domain pada level pejabat setingkat kepala dinas, yang dalam konteks Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan masing-masing kabupaten sasaran program dan juga *multistakeholders* memahami dan menyepakati penyelenggaraan *good governance* di tingkat desa, kesepahaman telah terbangun tetapi kesepahaman dan kesepakatan dalam memandang pentingnya penerapan prinsip-prinsip *good governance* di tingkat desa umumnya baru sebatas wacana yang belum didukung dengan kebijakan politik dan regulasi di tingkat daerah.³⁹

Itulah sebabnya mengapa program yang berisikan berbagai *output* dan aktivitas ini terkesan lebih menekankan aspek-aspek penyadaran dan penyebarluasan informasi serta diikuti berbagai upaya untuk mendorong kesadaran elite di tingkat kabupaten menjadi lebih dominan. Memang kesepahaman telah terbangun, tetapi kesepahaman dan kesepakatan dalam memandang pentingnya penerapan prinsip-prinsip *good governance* di tingkat desa umumnya baru sebatas wacana yang belum didukung dengan kebijakan politik dan regulasi di tingkat daerah. oleh karena itu untuk meningkatkan *good governance* di desa maka kita harus melihat akuntabilitas pemerintahan desa hal ini penting untuk meninjau sampai dimana tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1. Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengamanahkan, bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, kepala desa wajib :

³⁹Ibid,hlm 168-169.

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran; dan
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran⁴⁰

Terkait dengan kewajiban Kepala Desa tersebut jika tidak dilaksanakan, maka akan dikenakan sanksi. Adapun bentuk sanksi yang akan dikenakan kepada Kepala Desa yang melanggar kewajiban tersebut disebutkan sebagai berikut :

1. Sanksi administrasi yang berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
2. Jika sanksi administrasi tersebut tidak dilaksanakan, akan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.⁴¹

Dalam prinsip *good governance*, pelaksanaan pembangunan tidak hanya merupakan tugas pemerintah (*state*), tetapi juga menjadi tanggung jawab swasta (*private*) dan masyarakat madani (*civil society*). Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Joko Widodo bahwa partisipasi masyarakat diperlukan untuk menciptakan *good governance* (pemerintahan yang baik) yang memiliki unsur-unsur akuntabilitas, partisipasi, *predictability*, dan transparansi. Oleh karena itu, salah

⁴⁰Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴¹Op.cit Moch Solekhan, hlm 82-83.

satu prinsip *good governance* adalah tumbuh dan berkembangnya Partisipasi masyarakat.

Sementara Cohen dan Uphoff dalam Ndraha menguraikan bentuk-bentuk partisipasi yang terbagi dalam empat bentuk, yaitu: 1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*) 2. Partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*) 3. Partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefits*) 4. Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*). Menurut Thubany dalam Purnamasari partisipasi penuh dapat terwujud jika struktur kelembagaan memungkinkan warga untuk berpartisipasi dan memutuskan persoalan mereka sendiri sehari-hari dan representasi masyarakat yang terwakili secara proporsional di dalam setiap proses pengambilan kebijakan atas nama kepentingan bersama. Oleh karenanya, partisipasi masyarakat harus didasarkan pada: (1) pembuatan keputusan, (2) penerapan keputusan, (3) menikmati hasil, dan (4) evaluasi hasil. Sementara empat aspek yang menjadi indikasi terbangunnya partisipasi, yakni :1) informasi atau akses lainnya 2) inisiatif (*voice/suara*) dan apresiasi warga (masukan) 3) mekanisme pengambilan keputusan 4) kontrol pengawasan. Berdasarkan beberapa uraian dari pengertian partisipasi tersebut, dilihat dari perkembangannya partisipasi tidak lagi diasumsikan sebagai pemberian kontribusi berupa uang atau sarana masyarakat secara sukarela, tetapi lebih ditekankan pada pengembangan kapasitas masyarakat yang di dalamnya terdapat unsur pelibatan masyarakat dalam informasi, pengambilan keputusan serta kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan yang mempengaruhi masa depan masyarakat itu sendiri.⁴²

⁴²Fathurrahman Fadil, **Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal**, Volume II Edisi 2, Juli-Desember 2013, hlm 256.

Mendasarkan pada pendapat diatas, fakta di lapangan seringkali menunjukkan sejumlah *stakeholders* yang masih mempersepsikan partisipasi dalam batasan yang sempit dan pasif, dimana masyarakat dikatakan partisipatif jika mereka mau mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan oleh pemerintah. Pada tataran yang ideal dan obyektif sebenarnya dukungan bukan merupakan satu-satunya bentuk partisipasi. Protes, kritik, resintensi, tuntutan pada dasarnya juga mempunyai porsi yang sama untuk dikatakan sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Karena itu, tujuan teoritis dari Soetrisno tersebut lebih tepat jika ditekankan pada definisi yang kedua, yaitu partisipasi sebagai bentuk kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan. Sebagaimana idealnya proses kerjasama harus dilakukan dengan sadar, aktif, dan sukarela tanpa paksaan.

Menurut Goulet, bahwa pemrakarsa partisipasi dapat berasal dari atas (penguasa atau para ahli), bawah (masyarakat), atau dari pihak ketiga (dari pihak luar). Dalam hal pemrakarsa ini, fakta di lapangan menunjukkan, bahwa pemrakarsa dari para penguasa lebih menonjol dibanding pemrakarsa dari bawah atau masyarakat. Hal ini menandakan dan membuktikan, bahwa partisipasi ideal yang sulit ditemukan dalam tataran praktis adalah partisipasi yang dimulai dari tingkat bawah dan berkembang ke tingkat atas menuju bidang-bidang yang semakin meluas dalam pembuatan keputusan.⁴³

Analisis tersebut nampaknya berlaku dan sangat relevan untuk memahami fakta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan ADD di Desa Gunungrejo. Partisipasi di tingkat desa sebagai basis wilayah masyarakat yang

⁴³Op.cit Moch Soekhan, hlm 114-115.

paling dekat masih sulit untuk dikatakan telah efektif, kecuali yang menjadi fokus perhatiannya adalah aktor-aktor yang berperan dan memiliki kedudukan sebagai elite, baik elite formal pemerintahan maupun informal yang berada di tengah-tengah masyarakat.

Analisis tersebut juga semakin kuat jika menstrukturkan pendapat Islamy yang menyatakan, bahwa partisipasi publik dalam pembangunan perlu dilihat sebagai *shared authority* diantara para *stakeholders* pembangunan, dimana proses pembangunan tidak didominasi oleh satu pihak saja, tetapi merupakan suatu usaha bersama yang didasarkan pada nilai bersama (*shared values*), visi bersama (*shared vision*), dan misi bersama (*shared mission*). Dalam proses pembangunan, komunikasi antara pihak yang memiliki wewenang dengan pihak yang terkena dampak dari proses pembangunan tersebut menjadi hal yang sangat esensial (sangat penting) karena akan diharapkan terjadi saling pengertian dan saling memahami diantara pihak-pihak yang terlibat tersebut.⁴⁴

Aspek lain yang perlu diperhatikan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa buntan barat ini adalah mengenai bentuk, wujud, dan tipologi dari partisipasi masyarakat itu sendiri. Fakta di lapangan menunjukkan, bahwa partisipasi masyarakat yang muncul adalah partisipasi yang digerakkan (dimobilisasi) oleh aparat pemerintah desa, Kepala Dusun, Ketua RW dan para Ketua RT. Realitas partisipasi masyarakat tersebut apabila dianalisis dengan menggunakan teori partisipasi dari Anstein Wilcox yang dikenal dengan *ladders of participation* (tangga partisipasi), maka akan didapat sebuah pemahaman, bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa buntan barat masih berada dalam

⁴⁴Ibid, hlm 115.

tataran derajat partisipasi yang disebut Partisipasi tingkat pertama: tangga 1 (satu) dan 2 (dua): yaitu manipulasi dan terapi. Tingkat pertama ini merupakan tingkatan partisipasi yang tidak bisa disebut sebagai partisipasi atau Non-Partisipasi. Manipulasi adalah tidak ada partisipasi dari warga masyarakat. Yang ada hanya wakil saja tetapi tidak berfungsi apapun.

Fakta lain yang menguatkan kesimpulan ini adalah desa buntan barat tidak ada keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam mengambil kebijakan bahkan sekedar mendapatkan informasi saja mereka tidak mendapatkannya dan terjadi karena adanya perintah atau instruksi dari pemerintah desa. Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa tersebut, hanya sebatas Penyampaian LKPJ (Laporan Keterangan PertanggungJawaban) Pengelolaan Dana Desa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) .

2. Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Transparansi

Masalah utama bangsa Indonesia saat ini adalah korupsi. Akar dari persoalan merebaknya praktik korupsi adalah pemerintahan yang berjalan secara tertutup dan penuh kerahasiaan. Korupsi terjadi karena publik tidak memiliki instrumen untuk mengontrol penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya publik. Instrumen tersebut, antara lain, jaminan hukum yang memadai atas hak publik untuk mendapatkan informasi tentang kinerja dan kebijakan badan-badan publik .

Pendapat tersebut dikuatkan oleh Widodo yang menyatakan, bahwa reformasi yang terjadi pada tahun 1998 sejatinya juga bersumber dari tiadanya keterbukaan informasi. Akibat mengabdikan lebih pada pusat kekuasaan, hak-hak warga negara diabaikan. Lebih daripada itu, informasi sebagai sumber transparansi kala itu tidak cukup dimiliki oleh warga negara. Implikasinya, rakyat

sama sekali tidak berperan dalam semua kebijakan publik dan hanya berposisi sebagai obyek belaka.

Transparansi atau keterbukaan publik berarti adanya minat dan upaya untuk saling kontrol dan bertanggung jawab. Kelembagaan pemerintah yang transparan dan ber-akuntabilitas publik berarti lembaga tersebut berminat untuk menerima kontrol masyarakat yang senantiasa mau mempertanggung-jawabkan segala kegiatan yang diamanati oleh rakyat. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik menjadi sebuah keniscayaan, dan merupakan salah satu ciri penting negara demokratis. Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juga telah melembagakan prinsip transparansi badan publik dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi pemerintahan.⁴⁵

Undang-Undang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) tersebut juga mewajibkan semua badan dan publik menyediakan informasi publik secara transparan. Sedangkan informasi publik yang harus dibuka secara transparan itu, antara lain : rencana kebijakan publik, penggunaan keuangan, dan kegiatan yang dilakukan yang dilakukan badan publik. Sekalipun demikian, memang tidak semua informasi disediakan. Ada sejumlah informasi yang dirahasiakan dan hanya boleh diminta dengan persyaratan.

Widodo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan badan publik adalah semua lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan lembaga yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD dan termasuk

⁴⁵Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Keterbukaan Publik.

organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Implikasi atas pemberlakuan UU KIP tersebut, maka semua badan publik harus menyediakan tenaga yang secara khusus menangani masalah informasi. Dalam UU disebutkan namanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Lebih daripada itu, semua badan publik juga harus menyiapkan sistem manajemen informasi publik yang terorganisir.

Menurut Douglas yates yang dikutip oleh Syamsuddin bahwa dalam masyarakat yang plural, dan sistem pemerintahan yang demokratis, serta amanah itu berangkat dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- (1) Bahwa didalam masyarakat itu terdapat banyak sekali kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) yang berbeda satu sama lain dan saling bersaing.
- (2) Bahwa pemerintah itu harus menawarkan suatu akses dan sarana partisipasi yang sama kepada kelompok-kelompok kepentingan tersebut.
- (3) Bahwa pemerintah harus mempunyai banyak pusat-pusat kekuasaan yang menyebar baik vertikal maupun horisontal untuk menjamin keseimbangan (*a balance of power*). Ini berarti bahwa pemerintah harus melakukan prinsip desentralisasi kekuasaan dan kewenangan.
- (4) Bahwa pemerintah dan politik itu harus bisa dipahami sebagai suatu sarana kompetisi diantara kepentingan-kepentingan minoritas.
- (5) Bahwa ada probabilitas yang tinggi bahwa suatu kelompok yang aktif dan legitimate dalam suatu populasi bisa membuat dirinya mendengar secara efektif terhadap tahapan-tahapan yang krusial dalam proses pembuatan kebijaksanaan.

- (6) Bahwa kompetisi diantara institusi pemerintahan dan kelompok-kelompok kepentingan non-pemerintah bisa menyebabkan terjadinya suatu bargaining dan kompromi, dan juga bisa menghasilkan suatu keseimbangan kekuasaan dalam masyarakat.⁴⁶

Dengan asumsi seperti tersebut diatas, Yates dalam Syamsuddin menyarankan agar birokrasi pemerintah mewujudkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Menyediakan banyak pusat-pusat kekuasaan sebagai sarana keseimbangan dan untuk mengontrol jika terjadi konsentrasi kekuasaan. Artinya pemerintah sama sekali tidak diperbolehkan memusatkan kekuasaan di salah satu institusi;
- (2) Memberikan fasilitas atau kemudahan kepada kelompok-kelompok kepentingan agar terwakili dengan menyediakan titik akses yang terlipat ganda;
- (3) Mempunyai kemauan dan elemen yang kuat untuk melakukan desentralisasi;
- (4) Pemerintah harus menjadikan dirinya secara internal bisa bersaing;
- (5) Pemerintah harus terbuka dan partisipatif; dan
- (6) Pemerintah harus mampu menghasilkan proses bargaining yang luas.⁴⁷

dengan adanya keterbukaan atau transparansi informasi publik tersebut, diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik.

⁴⁶Syamsudin Lukman, **Manajemen Keuangan Perusahaan**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 91-92.

⁴⁷Ibid, hlm 92.

3. Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa yang Ideal

Keberadaan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di desa merupakan salah satu formalisme demokrasi, BPD berperan sebagai lembaga perwakilan di tingkat desa, yang memberikan saran kepada kepala desa dalam merumuskan anggaran belanja desa. Pada proses pertanggung jawaban kepala desa akan memberikan laporan terkait dengan pengelolaan dana desa kepada BPD. Hal ini dilakukan sebagai wujud transparansi yang dilakukan oleh kepala desa, hanya saja dalam pelaksanaannya hal ini kurang ideal karena sedikit warga yang bisa berpartisipasi, terlebih lagi masyarakat desa secara keseluruhan harus mengetahui Pengelolaan Dana Desa.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan uraian diatas maka Laporan Pertanggung-jawaban Kepala Desa akan lebih ideal apabila dilakukan melalui sebuah diskusi bersama seluruh masyarakat desa, misal dengan cara melakukan LPJAN secara terbuka di kantor desa dengan membuka ruang diskusi bersama dengan masyarakat desa, agar informasi mengenai pengelolaan anggaran desa tidak hanya sekedar formalitas tapi juga ada sesi tanya jawab, sehingga masyarakat juga dapat bertanya mengenai alasan dibuatnya agenda atau program kerja pemerintah desa, dan mereka dapat membantu penyelenggaraan program tersebut apabila itu memungkinkan, hal ini penting untuk melatih masyarakat agar lebih mengetahui kinerja pemerintah desa

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka penulis membuat kesimpulan mengenai Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa sebagaimana berikut:

3. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, masih belum dapat dilaksanakan hal ini dikarenakan ketidaktahuan Perangkat Desa mengenai adanya kewajiban untuk menginformasikan laporan itu melalui papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya.
4. Mekanisme pertanggung jawaban kepala desa yang ideal ialah membuka ruang diskusi bagi masyarakat untuk ikut serta forum pertanggungjawaban kepala desa, sehingga masyarakat dapat bertanya secara langsung mengenai pengelolaan dana desa.

B. SARAN

1. Penulis berharap pemerintah dapat melakukan sosialisasi yang lebih baik terhadap Perangkat Desa mengenai Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, sehingga nantinya tidak ada lagi alasan bahwa mereka tidak mengetahui adanya informasi tersebut.
2. Agar pemerintah dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi pengelolaan dana desa

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asmara Galang, 2005, Omdusman Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, Laksbang, Yogyakarta.

Ali Achmad dan Haeryani Wiwie, 2012, Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum, Kencana, Jakarta.

Budiardjo Mirriam dan HR Ridwan, 2002, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Fajar Muktie, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan *Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Huda Ni'matul, 2015, Hukum Pemerintahan Desa, Setara Press, Malang.

Hamidi Jazim dan Lutfi Mustafa, 2011, Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah, UB Press, Malang.

Muhammad Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung , PT. Citra Aditya Bakti.

Muhdar dan Anshar, 2010, Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, LaksBang Press indo, Yogyakarta.

Sutedi Adrian, 2012, Hukum Keuangan Negara, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Palupi Sri dan Ulfiah Ufi DKK, 2016, Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak, Lakpesdam PBNU, Jakarta.

Nico Andrianto, 2007, Transparasi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government, Bayumedia Publishing, Malang.

Margono, 2014, Metodologi Penelitian Pendidikan, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Moch. Solekhan, 2014, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat, Setara Press, Malang.

Budiman Sudjatmiko dan Yando Zakaria, 2015, Desa Kuat Indonesia Hebat, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Bhatta Ghambi, 1996, *Capacity Building At The Local Level For Effective Governance Empowerment Without Capacity Is Meaningless, Paper presented In The International Conference on Governance Innovation : Building The Government – Citizen – Business Partnership*, Manila,Philippines.

repository.ub.ac.id

Ganie-Rochman, 2001, “*Good Governance* “Prinsip,Komponen dan Penerapannya”, dalam HAM: Penyelenggaraan Negara Yang Baik dan Masyarakat Warga, KOMNAS HAM, Jakarta.

Joko Widodo, 2001, *Good Governance*, Insan Cendikia, Surabaya.

Dwipayanadan Eko S, 2003, Membangun *Good Governance* di Desa, IRE Press, Yogyakarta.

Lukman Syamsudin, 2007, Manajemen keuangan perusahaan, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ananto Basuki dan Sofwan, 2006, Penguatan Pemerintahan *Desa* Berbasis *Good Governance*, Sekretariat Penguatan Otonomi Desa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.

Syamsudin Lukman, 2007, Manajemen Keuangan Perusahaan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Informasi Keterbukaan Publik

JURNAL

Husin Sulumin Hasman, Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala, Diakses Melalui <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/viewFile/4246/3161>.

M Mega Fransiska, Kinerja Kepala Desa Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Masyarakat Di Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Miahasa Selatan diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/viewFile/7819/7382>.

Yusuf R, Analisis Pengawasan Dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, diakses melalui <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/Publika/article/download/583/364>.

Fathurrahman Fadil, Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 2, Juli-Desember 2013

WEBSITE

Musta'in, **Landasan Teori**, diakses melalui

<http://eprints.stainkudus.ac.id/306/5/5.%20%20MUSTA%27IN%20BAB%202.pdf>.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, **Dana Desa**, diakses melalui

<https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik

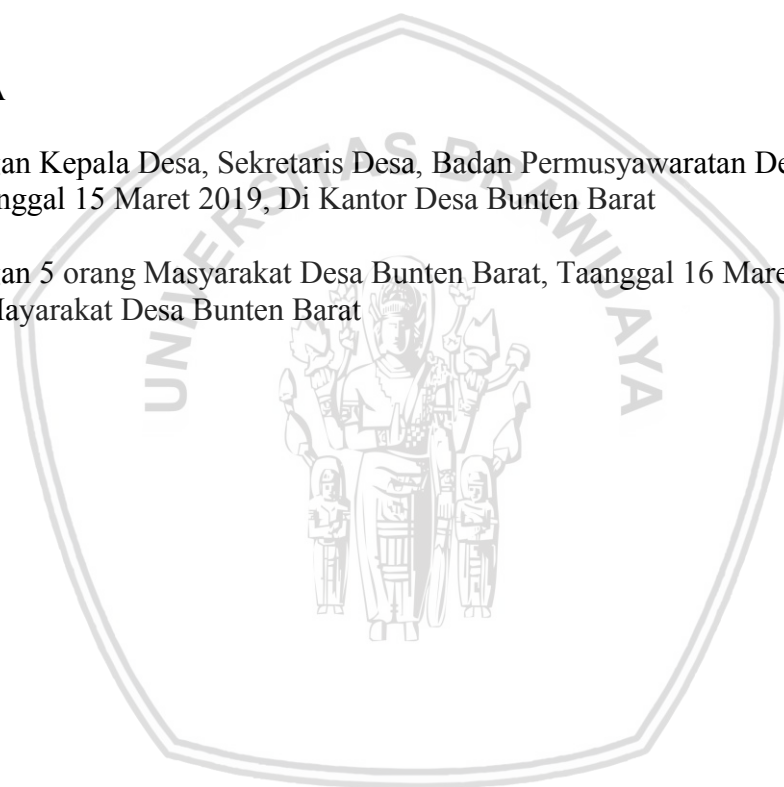
Indonesia, **Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa**, diakses melalui

<https://www.kemenkopmk.go.id/publikasi/buku-bantu-pengelolaan-pembangunan-desa-1>.

WAWANCARA

Wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa Buntén Barat, Tanggal 15 Maret 2019, Di Kantor Desa Buntén Barat

Wawancara dengan 5 orang Masyarakat Desa Buntén Barat, Tanggal 16 Maret 2019, Di Rumah Masyarakat Desa Buntén Barat



LAMPIRAN: Dokumentasi



Kantor Desa di Desa Buntan Barat



Wawancara Bersama Perangkat Desa Buntan Barat



Wawancara Bersama Masyarakat Desa Buntan Barat